



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi uji ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus

- Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah	Rp. 75.000,-
- Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 25 buah	Rp. 100.000,-
- Kapasitas tempat duduk di atas 26 buah	Rp. 125.000,-
 - b. Mobil barang

- JBB S/D 3.500 kg	Rp. 50.000,-
- JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg	Rp. 75.000,-
- JBB di atas 8.000 kg	Rp. 100.000,-
- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg	Rp. 125.000,-
- JBB di atas 14.000 kg	Rp. 150.000,-
 - c. Mobil penumpang umum

- Roda 4 (empat)	Rp. 50.000,-
- Roda 3 (tiga)	Rp. 25.000,-
 - d. Kereta gandeng atau tempelan

	Rp. 100.000,-
--	---------------
 - e. Kendaraan khusus

	Rp. 100.000,-
--	---------------
 - f. Kereta tempel

	Rp. 100.000,-
--	---------------
 - g. Kendaraan penumpang pribadi (hanya uji emisi) Rp. 25.000,-

- | | |
|--|---------------|
| h. Kendaraan roda 2 (dua) | Rp. 10.000,- |
| 2. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut : | |
| a. Formulir Pendaftaran | Rp. 5.000,- |
| b. Pembuatan atau pergantian buku uji | Rp. 35.000,- |
| c. Plat uji (pergantian) | Rp. 30.000,- |
| d. Tanda samping / stikerj uji | Rp. 30.000,- |
| e. Surat keterangan numpang uji | Rp. 50.000,- |
| 3. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan : | |
| a. Mobil bus | Rp. 100.000,- |
| b. Mobil barang | Rp. 100.000,- |
| c. Mobil penumpang umum | Rp. 100.000,- |
| d. Kereta gandengan / tempelan | Rp. 100.000,- |
| e. Kendaraan khusus | Rp. 100.000,- |
| 4. Besarnya tarif retribusi ulang ditetapkan sebagai berikut : | |
| a. Mobil bus | Rp. 50.000,- |
| b. Mobil barang | Rp. 50.000,- |
| c. Mobil penumpang umum | Rp. 50.000,- |
| d. Kereta gandengan / tempelan | Rp. 50.000,- |
| e. Kendaraan khusus | Rp. 50.000,- |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Maret 2016
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005